



Buletin Parlementaria

Nomor 1169/IV/IX/2021 • September 2021



Ketua DPR: Jangan Ada Daerah 'Ketinggalan Kereta' Karena Vaksinasi Rendah



3 Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, DPR: Siapkan Faskes



4 DPR Apresiasi Terbentuknya BUMDes Bersama Situbondo



9 772614 339005



BULETIN

Ketua DPR: Jangan Ada Daerah 'Ketinggalan Kereta' Karena Vaksinasi Rendah

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang turun langsung ke daerah-daerah yang tingkat vaksinasinya masih rendah. Menurut Puan, langkah ini penting untuk mengurangi ketimpangan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

"Jangan sampai nanti ketika mayoritas wilayah di Indonesia ekonominya mulai pulih akibat vaksinasi tinggi, tapi masih ada daerah lain 'ketinggalan kereta' karena vaksinasinya masih rendah. Rakyat di semua daerah harus menikmati pemulihan ekonomi ini bersama-sama," kata Puan di Kota Serang, Banten, Selasa (21/9).

Hal itu disampaikan Puan ketika menghadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten di Kantor Gubernur Banten. Acara dihadiri Presiden Jokowi, Gubernur Banten beserta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang sebelumnya bersama-sama meninjau vaksinasi di sekolah dan puskesmas di Kota Serang.

Politisi PDI-Perjuangan tersebut mengatakan, harus ada terobosan dalam komunikasi untuk meyakinkan masyarakat Provinsi Banten agar tidak takut divaksinasi. "Rakyat memang perlu dikunjungi, diajak, diyakinkan oleh pemimpin di daerahnya untuk mau divaksin, bahwa vaksin efektif untuk melindungi diri dari gejala berat Covid-19," ujar Puan.

Secara khusus, Puan meminta seluruh kepala daerah yang ada di Provinsi Banten ini untuk solid dan bergotong royong dalam vaksinasi dan juga penanganan Covid-19 secara luas.



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meninjau lokasi vaksinasi siswa sekolah di Kota Serang, Banten. Foto: Bonis/Man

"Tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini kalau kemudian hanya di pusat saja yang kemudian menjalankan hal tersebut. Jadi saya minta gotong royong dan rasa kebersamaan di antara kita dalam mengatasi masalah dalam situasi Covid ini," ujar Puan.

Puan mengatakan, soliditas para pimpinan daerah ini akan berujung pada pelayanan publik yang baik dalam penanganan Covid-19. Legislator dapil Jawa Tengah V itu juga mengapresiasi soliditas pimpinan daerah dalam menggelar vaksinasi di SMA 4 Kota

Serang yang disambut antusias oleh ratusan siswa yang hadir.

Menurutnya, vaksinasi yang lancar buat pelajar akan memberi rasa tenang dan aman ketika pembelajaran tatap muka dilakukan, meski baru secara terbatas. "Suasana kebatinan anak-anak itu sangat berbeda, mereka gembira, mereka ceria, mereka bisa bertemu dengan teman-temannya setelah hampir 2 tahun suasana itu hanya daring," tutup mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut. ■ ah/sf



Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, DPR: Siapkan Faskes



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Eot/Man

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah meningkatkan

kapasitas fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi prediksi puncak gelombang ketiga penyebaran virus Covid-19 yang diperkirakan ahli epidemiologi terjadi Desember 2021.

“Kepada pemerintah, kami minta untuk fasilitas sarana dan prasarana tetap diwaspadakan. Rumah sakit-rumah sakit juga harus tetap dalam keadaan waspada, jangan lengah dan kondisi selalu siaga. Kalau gelombang ketiga itu

ada, kita sudah siap,” ujar Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/9).

Kendati demikian, Dasco menyebut jika bukan hanya pemerintah yang perlu mewaspada puncak gelombang ketiga penyebaran Covid. Masyarakat juga perlu mengambil peran agar hal tersebut tidak terjadi.

Menurutnya, pemerintah dan masyarakat jangan sampai lengah dengan tren penurunan kasus Covid-19 di Indonesia. Terlebih, kata politisi Partai Gerindra itu, memasuki November-Desember akan ada banyak libur nasional.

“Kita sudah bersama mengalami pahitnya lonjakan pandemi kedua di mana banyak rumah sakit kemudian dayaampungnya melebihi kapasitas tidak memadai dan lalu obat-obatan yang tidak memadai,

kemudian sebaran yang begitu cepat membuat kita semua kewalahan. Mari kita sama-sama kepada bangsa Indonesia kita jangan lengah, kita tetap protokol kesehatan,” jelas Dasco.

Dasco menambahkan, seluruh pihak harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dan segera mendapatkan vaksinasi untuk mencegah kasus positif kembali melonjak. “Marilah kita kemudian memperkecil risiko, artinya menjaga bukan hanya kita dan keluarga, tetapi lingkungan sekitar kita,” pesan Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu. ■ sf



Ketua DPR: Jangan Ada Daerah 'Ketinggalan Kereta' Karena Vaksinasi Rendah



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiaryah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullli, Puntho Pranowo, Singih Kinanti Rimhani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Anief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afrhillah, Gerald Ople, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita

INFOGRAFI

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Muhammad Ali, Mulus Karyadi,

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

DPR Apresiasi Terbentuknya BUMDes Bersama Situbondo

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyambut baik terobosan yang dilakukan oleh masyarakat Situbondo, Jawa Timur yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama. Diketahui, BUMDes Bersama Situbondo dibentuk secara gotong royong dan merupakan gabungan dari 60 desa se-Kabupaten Situbondo.

“Ini (BUMDes Bersama) yang pertama yang saya dengar. Ini saya kira perlu didorong dan diperkuat. Karena apa? Kalau BUMDes-nya berjalan sendiri-sendiri, dia tidak akan begitu kuat. Bandingkan saja dengan 60 desa yang bergabung menjadi satu,” terang Gobel saat menerima audiensi jajaran Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan BUMDes Situbondo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (17/9).

BUMDes Bersama Situbondo, menurut Gobel banyak memberikan nilai tambah, sehingga layak untuk dijadikan *role model* bagi BUMDes di daerah lain. “Misalnya dari 60 desa, salah satunya penghasil sayur, desa

”

AGAR PIHAK BUMDES BERSAMA SITUBONDO MULAI MEMETAKAN POTENSI YANG ADA, MENGHIMPUN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KEMUDIAN MULAI MERUMUSKAN VISI BUMDES



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menerima cenderamata usai menerima audiensi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan BUMDes Situbondo. Foto: Andri

yang lain menghasilkan apa. Nah, satu desa tersebut kalau bisa memenuhi kebutuhan 60 desa lainnya, itu sudah memberikan keuntungan tersendiri. Hal seperti ini mesti kita dorong,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini menyarankan agar pihak BUMDes Bersama Situbondo mulai memetakan potensi yang ada, menghimpun sumber daya manusia (SDM) kemudian mulai merumuskan visi BUMDes yang disesuaikan dengan keragaman yang dimiliki.

“Insya Allah nanti saya akan ke Situbondo. Bagaimana kita harus membuat BUMDes Bersama ini menjadi bagian daripada memperkuat NKRI, karena BUMDes bukan hanya sekedar bisnis. Dan akan lebih bagus lagi kalau koperasi desa dimasukkan sebagai pemegang saham. Karena

koperasi sahamnya milik rakyat. Dengan begitu, bantuan-bantuan dari pusat akan turun,” tandas politisi Partai NasDem itu.

Ditemui usai audiensi, Ketua BUMDes Bersama Situbondo Juharto berharap agar ada sebuah regulasi yang menjadi payung hukum terkait BUMDes yang didirikan atas beberapa desa. Ia juga berharap agar ada suntikan dana dari pemerintah guna mengembangkan kegiatan usaha yang makin berpihak kepada masyarakat.

“Sementara ini kami melayani simpan pinjam. Ke depan akan berkembang seperti peternakan dan usaha lainnya jika regulasi yang mengatur BUMDes Bersama sudah ada. Dan terimakasih karena sudah difasilitasi oleh Bapak Rachmat Gobel,” pungkas Juharto. ■ es

Pandemi, Gus Muhaimin: Negara Harus Hadir Atasi Persoalan Pekerja Migran



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Ist/man

Pandemi Covid-19 berkepanjangan tidak hanya menjadi persoalan di dalam negeri, namun juga menjadi masalah besar bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di luar negeri. Di sejumlah negara tujuan, persoalan yang dihadapi para PMI tidak hanya menyangkut ancaman keselamatan jiwa akibat Covid-19, namun juga soal keberlangsungan hidup akibat *lockdown* yang berlaku di beberapa negara, sehingga mereka tidak bisa bekerja.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, negara harus hadir di tengah belitan persoalan para pekerja migran. “Berikan perlindungan yang optimal untuk para pahlawan devisa ini. Harus ada solusi-solusi menyangkut problem jangka pendek

secara prosedural maupun problem pandemi. Ini membutuhkan perhatian serius,” ujar Gus Muhaimin pada webinar bertajuk “Gus Muhaimin Mendengar Pekerja Migran Indonesia: Pekerja Migran, Perlindungan Negara dan Pembangunan Ekonomi Lokal secara virtual, Sabtu (18/9).

Berbagai persoalan yang dihadapi para PMI selama hampir dua tahun belakangan di berbagai negara tujuan seperti Malaysia, Arab Saudi, Korea, Taiwan, Jepang, Singapura dan berbagai negara lain, mengharuskan pemerintah dan bangsa ini untuk melakukan langkah-langkah yang lebih signifikan dan strategis untuk mengatasi problematika dan solusi bagi para PMI.

Ketua Tim Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) ini mengatakan, dalam minggu-

minggu ini, dirinya memimpin rapat dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi persoalan PMI. Antara lain, Ditjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Konsulat, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial dan lintas kementerian untuk membuat satu rangkaian kegiatan untuk menyangkut pemulangan dan antisipasi keadaan PMI.

Menurutnya, dalam konteks ekonomi, menjadi pekerja migran adalah pilihan rasional yang bisa dilakukan oleh sebagian warga negara di tengah persoalan sulitnya lapangan kerja, pengangguran dan himpitan ekonomi di Tanah Air. “Pertumbuhan angkatan kerja yang tak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja telah menjadikan pilihan, menjadi pekerja migran adalah pilihan alternatif yang bisa dilakukan,” urainya.

Karena itu, menghadapi berbagai masalah pekerja migran, tindakan yang diambil pemerintah tidak boleh hanya bersifat reaktif. Misalnya penghentian pengiriman pekerja migran tanpa memikirkan kebijakan jangka panjang dalam bentuk paket kebijakan yang lebih memberdayakan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, kata Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan (Korkesra) DPR RI ini, baik secara makro maupun mikro, kelompok migran ini adalah salah satu agen transformasi pembangunan di wilayahnya. Triliunan rupiah yang dikirim para pekerja migran setiap tahun ke berbagai wilayah menurut Gus Muhaimin ikut berimplikasi pada pembangunan daerah. ■ sf

DPR Setujui RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik RI-Rusia

“Termasuk juga penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan hasil-hasil dan sarana-sarana tindak pidana, melalui bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana untuk segera diproses sesuai hukum yang berlaku,” tambah Anggota Fraksi PAN DPR RI itu.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di hadapan Rapat Paripurna mewakili Presiden menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak dari DPR yang terlibat dalam penyelesaian Undang-

K Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku)

Sufmi Dasco Ahmad menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Pengesahan tersebut dilakukan setelah Dasco meminta persetujuan kepada seluruh peserta Rapat Paripurna.

“Apakah Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau *Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* dapat segera disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Dasco dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar secara virtual dan fisik di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9) yang diiringi seruan ‘setuju’ seluruh Anggota Dewan.

Sebelum disahkannya RUU Perjanjian Timbal Balik Hukum Pidana tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh juga turut menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut antara Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Luar Negeri. Ia mengatakan bahwa Komisi III memandang penting RUU ini untuk segera disahkan bagi kepentingan negara dan masyarakat umum.

“Khususnya dalam memerangi berbagai kejahatan yang bersifat



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima laporan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh terkait RUU Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, pada Rapat Paripurna. Foto: Jaka/Man

transnasional (lintas batas) yang dapat terjadi pada situasi global seperti saat ini. RUU ini sekaligus memberi respon terhadap kebutuhan penegakan hukum yang memerlukan kerja sama internasional secara lebih komprehensif dengan negara lain, khususnya dengan Federasi Rusia,” jelas Pangeran.

Pangeran menekankan, dengan adanya RUU ini akan berguna untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara yang bersifat saling menghormati dan menguntungkan. Dengan adanya UU tersebut, Pangeran menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia atau sebaliknya dapat melaksanakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang ini. Yasonna menjelaskan, pemberlakuan perjanjian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkuat kerja sama penegakan hukum yang telah ada.

“Dimana Indonesia dan Rusia adalah negara pihak dalam sejumlah Konvensi PBB Anti Korupsi dan Konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional terorganisasi. Kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan,” tandasnya. ■ er/sf

DPR Tetapkan 5 Calon Anggota Dewas LPP RRI Periode 2021-2026



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad foto bersama dengan lima Dewas LPP RRI Periode 2021-2026. Foto: Jaka/Man

Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 - 2022 menetapkan lima nama calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Periode 2021-2026.

“Apakah laporan Komisi I DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon anggota Dewas LPP RRI Periode 2021-2026 tersebut dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin jalannya Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9).

Setelah mendapat persetujuan dari peserta rapat, Dasco mengesahkan kelima nama calon Anggota Dewas RRI, yakni Anwar Mujahid Adhy Trisnanto (unsur masyarakat),

Ederiman Butar Butar (unsur pemerintah), M Rini Purwandari (unsur masyarakat), Mohamad Kusnaeni (unsur masyarakat) dan Mohammad Rohanudin (unsur RRI).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono membacakan laporan Komisi I terhadap uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test* calon anggota Dewas LPP RRI Periode 2021-2026. Dia mengatakan, Komisi I telah melakukan *fit and proper test* calon anggota Dewas LPP RRI pada 19-20 Mei 2021 dan telah meloloskan lima nama.

Uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan secara terbuka, namun pada perjalanannya, terdapat dua calon yang mengundurkan diri. Sehingga calon anggota Dewan Pengawas LPP

RRI periode 2021-2026 yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan berjumlah 13 orang. “Adapun hasil pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Dewas LPP RRI Periode 2021-2026 diputuskan oleh Komisi I DPR RI melalui rapat intern yang dilaksanakan secara tertutup pada 20 Mei 2021,” jelas Bambang.

Komisi I juga menetapkan lima anggota cadangan, yaitu Yonas Markus Tuhuleruw (unsur pemerintah), Mohammad Suja'i (unsur pemerintah masyarakat), Gun Gun Siswadi (unsur masyarakat), Agnes Irwanti (unsur masyarakat) dan Rahadian Gingging (unsur RRI). Adapun, nama-nama yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI kemudian akan diserahkan pada Presiden RI untuk disahkan. ■ ann/es

Komisi I Dukung Peremajaan Alutsista Koarmada II Surabaya

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengatakan alutsista menempati posisi yang sangat penting karena sebagai salah satu unsur pembentuk kekuatan militer sebuah negara. Untuk itu, ia mendorong perlu dilakukan peremajaan alutsista milik TNI AL Koarmada II Surabaya.

“Kita punya kapal-kapal yang sangat tua, itu harus kita remajakan. Artinya diganti dengan yang baru. Kalaupun belum bisa, yang ada harus dirawat dengan baik sehingga layak untuk beroperasi,” terangnya usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Panglima Koarmada II Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto di KRI Dewaruci, Koarmada II Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/9).

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, Komisi I DPR RI akan mendukung penuh terkait anggaran yang dibutuhkan oleh Koarmada II Surabaya dalam modernisasi alutsista. Sebab, Koarmada II Surabaya memiliki tugas pokok sebagai Kotama Operasi yang pada dasarnya untuk menjaga pertahanan dan keamanan teritorial laut Republik Indonesia.

“Bangsa yang besar ialah bangsa yang memiliki armada laut yang kuat. Dalam hal ini, kami (Komisi I DPR RI) akan memperjuangkan berapapun anggarannya. Kami siap membantu terkait anggaran untuk modernisasi alutsista Koarmada II Surabaya dan tentu akan disesuaikan dengan baik pula dari sisi Pemerintah itu sendiri,” tutur Anton menutup pernyataannya. ■ hnm/sf



Foto bersama Tim Kunspek Komisi I DPR RI dengan jajaran Koarmada II Surabaya. Foto: Hanum/Man

Komisi I Apresiasi dan Dukung Upaya Lantamal VI Capai MEF



Anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan. Foto: Fitri/Man

Upaya Lantamal VI dalam melakukan modernisasi alutsista TNI guna mencapai Minimum

Essential Force (MEF) mendapat apresiasi dan dukungan Komisi I DPR RI. Modernisasi tersebut dinilai akan memberi dampak positif bagi matra laut dalam mengemban tugasnya.

“Komisi I DPR memberikan apresiasi kepada Komandan Pangkalan Utama TNI-AL (Danlantamal) VI Makassar beserta jajarannya terkait rencana modernisasi alutsista pada satuan jajaran Lantamal VI Makassar beserta harwat dan dukungan anggarannya,” kata Anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi I DPR ke Lantamal VI

Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/9).

Menurut Sjarifuddin, alokasi anggaran yang memadai memiliki peran penting agar operasional TNI khususnya satuan Lantamal VI Makassar dapat berjalan maksimal. Ia pun berharap satuan yang dipimpin oleh Danlantamal VI Laksamana Pertama TNI Benny Sukandari itu dapat memprioritaskan berbagai hal yang menjadi kebutuhan.

Sjarifuddin memastikan DPR RI berkomitmen untuk memberi dukungan melalui kebijakan dan dukungan politik anggaran. “Komisi I telah membentuk Panja Alutsista dan Panja Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit. Muara dari kedua Panja tersebut adalah penguatan TNI dalam mengemban tugas dan fungsi melalui ketersediaan alutsista yang ideal dan pemenuhan kesejahteraan prajurit,” tutup Wakil Ketua MPR RI itu. ■ srw/sf



Panja Tata Ruang Komisi II Serap Masukan ke Jabar

Panitia Kerja (Panja) Tata Ruang Wilayah Komisi II DPR RI menyerap masukan

terkait pengelolaan tata ruang wilayah dan segala permasalahan, khususnya setelah terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Provinsi Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan kunjungan tersebut

dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang meliputi rencana penyusunan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang wilayah dan berbagai



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Foto: Tiara/Man

persoalan yang ditemukan khususnya di Jabar.

“Kunjungan Panja Tata Ruang Komisi II DPR ke Jabar ini ingin memperoleh penjelasan dan masukan

secara lebih detail dan mendalam dari Pemprov Jabar sebagai bahan nanti Tim Panja Tata Ruang dalam menyusun rekomendasi di akhir tugas Panja. Yang nantinya akan menjadi bahan diskusi internal Komisi II DPR dan akan dijadikan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti dalam raker/RDP dengan kementerian/lembaga terkait,” jelas Saan usai memimpin Panja Tata Ruang Komisi II DPR RI, ke Kantor Wilayah BPN Jabar, Bandung, Jumat (17/9).

Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Politisi Partai NasDem ini menuturkan persoalan tata ruang menjadi isu yang penting ke depan. Dimana, tidak hanya semata-mata dalam konteks kepentingan investasi dan kemudahan orang dalam berusaha. Tapi juga penting di dalam dengan isu-isu baik global maupun nasional. ■ tra/es

Banten Dapat Jadi Contoh Penerapan KKPR Sesuai dengan Tata Ruang

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal berharap Provinsi Banten dapat menjadi contoh daerah penerapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang sesuai dengan prinsip tata ruang. Sebab, menurutnya, secara umum Banten sudah melaksanakan ketentuan tata ruang yang diatur dalam peraturan daerah mengacu pada tata ruang wilayah dan nasional.

“Dan (kesesuaian KKPR dengan tata ruang) ini akan kita coba sosialisasikan ke depan. Banten bisa jadi contoh diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Syamsurizal saat

memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Tata Ruang Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah Badan Pertahanan Negara (BPN) Provinsi Banten, di Serang, Banten, Jumat (17/9).

Komisi II, tambahnya, mendorong agar semua pihak yang membutuhkan KKPR untuk urusan bisnis, dapat memahami ketentuan baru yang ada dalam PP Nomor 21 tahun 2021. KKPR tersebut menggantikan izin lokasi dan berbagai Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dalam membangun dan mengurus tanah yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha melanjutkan proses izin berusaha.

Menurut politisi PPP ini, pelaku usaha, terlebih yang bergerak di sektor UMKM

dapat menyerap tenaga kerja hingga 85 persen. Sehingga, adanya KKPR yang disesuaikan dengan tata ruang ini diharapkan dapat mendorong investasi yang semakin banyak. ■ rdn/sf



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal. Foto: Ridwan/Man

Komisi V Dorong Peningkatan Sistem Pendidikan di PTDI-STTD



Foto bersama Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan jajaran PTDI-STTD. Foto: Chasbi/Man

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menilai bahwa sistem pendidikan sekolah kedinasan Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) perlu terus ditingkatkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk

mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi khususnya di bidang transportasi darat.

“Tadi banyak teman-teman (Anggota Komisi V DPR RI) memberi apresiasi yang luar biasa kepada direktur PTDI-STTD ini karena telah menampilkan dan mempertontonkan suatu yang memiliki

dinamika positif untuk masyarakat kita di masa yang akan datang,” kata Ridwan usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan Dirktur PTDI-STTD beserta jajaran di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/9).

Ridwan menyadari bahwa akses jalan darat di Indonesia sangat banyak. “Artinya tenaga-tenaga yang terampil sangat dibutuhkan. Kita lihat Pak Direktur menjelaskan sangat terperinci dan sangat menjanjikan bahwa transportasi darat ini akan ditangani atau dikerjakan oleh orang-orang yang terampil dan profesional pada waktunya. Tentu ini sangat kita harapkan dan bangga,” tambah Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.

Ridwan berharap tujuan sekolah kedinasan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Ia mengimbau untuk totalitas dalam menyumbangkan pikiran demi mewujudkan transportasi yang paripurna. Karena persoalan transportasi erat kaitannya dengan keselamatan jiwa.

Atas nama Komisi V DPR RI, Ridwan menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya salah satu siswa Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang beberapa waktu lalu. Pihaknya berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi di waktu mendatang di seluruh lingkungan sekolah kedinasan, khususnya di Kementerian Perhubungan. ■ Cas/es

Meninggalnya Siswa PIP Semarang Harus Jadi Momentum Berbenah

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi meminta Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang untuk segera melakukan pembenahan secara sistematis akibat dari adanya tragedi meninggalnya siswa PIP Semarang akibat perkelahian dan perundungan. Ia juga mengatakan, hal ini juga menjadi

peringatan untuk seluruh sekolah kedinasan di Indonesia agar terus melakukan pemantauan terhadap siswa secara berkala.

Hal tersebut disampaikan kepada *Parlementaria* usai memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI ke PIP Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/9). Arwani memahami betul mengenai pembinaan dasar yang dilakukan pihak

sekolah terhadap siswa baru. Namun, ia pun menginginkan ada solusi guna atasi tradisi sub-kultur kekerasan pada sekolah kedinasan yang memang dianggap telah mendarah daging.

“Kita sangat prihatin dengan kejadian meninggalnya salah satu siswa di PIP. Kunjungan kita kali ini harus menjadi satu momentum untuk berbenah, momentum untuk evaluasi secara menyeluruh

PPI Curug Siap Terapkan Pembelajaran Tatap Muka

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug sangat siap dalam proses pembelajaran tatap muka (offline). Ia juga berharap penerapan pembelajaran *online* sebagai dampak dari pandemi Covid-19, tidak mempengaruhi kompetensi dan keahlian para taruna/i di PPI Curug.

Hal ini disampaikan Andi Iwan saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan Direktur PPI Curug beserta jajaran di Curug, Tangerang, Banten, Jumat (17/9). Kunjungan Komisi V DPR RI ini dalam rangka meninjau kesiapan pembelajaran tatap muka di PPI Curug.

“Kita melihat bahwa pengelola, dalam hal ini Pak Direktur PPI Curug ini sangat siap dalam kondisi (Pembelajaran Tatap Muka) tersebut. Yang paling utama, bisa menjaga kompetensi ataupun keahlian para taruna/i ini. Jangan sampai *output*



Foto bersama Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan Direktur PPI Curug beserta jajaran. Foto: Tari/Man

dengan adanya sekolah *online* membuat kualitas kita menjadi menurun,” harap Andi Iwan.

Ia menyampaikan, dari paparan Direktur PPI Curug, ada beberapa metode pembelajaran *online* yang selama ini diterapkan menyikapi pandemi Covid-19. Meski demikian, sambung Aras, Direktur PPI Curug

menjamin kualitas dan kompetensi para alumnus PPI Curug.

Andi Iwan juga mendorong Kementerian Perhubungan segera memperbaharui sistem data dan peralatan pelatihan di PPI Curug, agar para alumni dapat mengikuti perkembangan teknologi nasional maupun internasional yang pesat. ■ mri/es



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi (kanan) saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI ke PIP Semarang, Jawa Tengah. Foto: Angga/Man

semua yang berkaitan dengan pola pengajaran dan komunikasi di PIP. Kita ingin agar tradisi sub-kultur kekerasan yang ada itu bisa kita hilangkan,” terang Arwani lebih lanjut.

Politisi PPP ini menerangkan, munculnya kasus seperti ini menciptakan stigma tentang membenaran bahwa di setiap sekolah kedinasan sering terjadi kasus-kasus kekerasan dengan dalih pembinaan senior terhadap junior. Untuk itu, ia menyarankan agar sekolah kedinasan milik Kementerian Perhubungan ini dapat segera melakukan perubahan secara struktural dan fokus menciptakan

sumber daya manusia yang unggul di bidang pelayaran Indonesia.

“Kita berikan satu solusi sehingga PIP betul-betul menjadi salah satu kawah candradimuka untuk SDM-SDM handal kita, SDM-SDM unggul kita di bidang pelayaran. Kita dengan adanya tragedi ini kita sangat berduka, oleh karena itu kita berharap ada satu media, satu mekanisme untuk agar komunikasi antar pengelola siswa dan orang tua siswa ini bisa terjalin lebih baik lagi agar tidak ada tragedi baru yang terjadi yang tentu merugikan kita semua,” jelas politisi dapil Jateng III ini. ■ er/es

Komisi VI Tinjau Operasional Tambang Antam



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin Tim Kunspek Komisi VI DPR RI ke PT Antam di Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Bogor, Jawa Barat. Foto: Oji/Man

Pada kunjungan ini, Komisi VI DPR RI melihat berbagai upaya yang dilakukan Antam dalam beberapa tahun terakhir, sebagai upaya mereklamasi bekas tambang menjadi wisata *ecopark*. “Hal tersebut dilakukan agar tetap mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar,” tandas Martin.

Pada kesempatan itu, Direktur Operasional dan Transportasi PT Antam Risono memaparkan, kehadiran Antam mampu memberikan dampak sosial yang positif dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. “Lahirnya 11 BUMDes se-Kecamatan Nanggung, terbentuknya 3 kelompok tani serta peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menjaga lingkungan adalah program kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Ia menambahkan, Antam juga tengah mengelola sebuah tempat wisata yang dulunya merupakan areal bekas pertambangan emas. Tempat tersebut bernama Goa Tambang Emas Gunung Pongkor. Area itu tak lagi dioperasikan karena cadangannya telah habis, goa tersebut akhirnya dijadikan tempat wisata. ■ oji/es

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan, tambang bawah tanah di Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu tambang produksi emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Indikasi adanya kandungan biji emas di Gunung Pongkor pertama kali ditemukan oleh Unit Geomin pada tahun 1981 dan mulai diproduksi pada tahun 1994.

Demikian disampaikan Martin saat memimpin Tim Kunspek Komisi VI DPR RI ke PT Antam di Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/9). “Walau tambang Gunung Pongkor ini diproyeksikan akan segera habis, namun kontrak eksplorasi di wilayah tambang ini sudah diperpanjang 10 tahun hingga 2031 yang semestinya habis pada 2021,” ujar Martin.

Perbaiki Manajemen Pengelolaan Pertamina RU VI Balongan

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, PT Pertamina RU VI Balongan perlu memperbaiki sistem manajemen pengelolaan akibat dampak dari kebakaran kilang minyak belum lama ini terjadi. Dirinya tidak menginginkan kejadian



Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Foto: Jaka/man

PLN Diminta Petakan Kebutuhan Anggaran Proyek Infrastruktur Bersumber PMN

Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon mendorong PT PLN (Persero) agar dapat melakukan pemetaan (mapping) terhadap kebutuhan anggaran infrastruktur yang masih harus dibangun dari proyek yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2020. Pemetaan ini agar tercipta sinergi proyek-proyek PLN dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Karena menjadi suatu sifat apabila satu daerah itu berkembang secara populasi, maka akan berkembang juga secara ekonomi. Sehingga di masa depan PLN diharapkan bisa

serupa terulang, apalagi hal tersebut menyangkut terhadap kedaulatan energi Indonesia.

“Jangan sampai dalam waktu yang sangat pendek, terjadi kebakaran yang sama, jangan pula pada waktu terjadinya kebakaran terlambat menanganinya. Karena akan berimbas dan berefek kebakaran pada kilang-kilang lainnya, tentu akan mengganggu ketersediaan BBM di dalam negeri,” ujar Herman saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pertamina RU VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (16/9).

Sebagai BUMN, di samping Pertamina harus menunjukkan performanya dengan baik pada semua sisi, baik itu manajemen keuangan, produksi, pemasaran dan



Foto bersama Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan jajaran PLN Jawa Tengah. Foto: Devi/Man

melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan ini, dan bukan memasang infrastruktur yang tambal sulam,” ujar Sondang di sela-sela mengikuti kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik

tanggap darurat, Pertamina perlu menambah sumber daya manusia (SDM) dengan kualifikasi yang ketat. Sehingga, SDM Pertamina betul-betul memahami manajemen kilang untuk menerapkan *safety environment* dan *security* dengan baik dalam menjalankan tugasnya.

“Kalau pengalaman saya dulu di perusahaan minyak, kita harus betul-betul siap dengan kondisi dan keadaan tertentu. Ini yang betul-betul dan harus dipegang. Sehingga produksi tidak terganggu, pengembangan dapat dilakukan dan aktifitas masyarakat juga tidak terganggu karena terpenuhi kebutuhan bahan bakar minyak,” imbuh Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu menutup pernyataannya. ■jka/es

Komisi VI DPR RI ke PLN Jawa Tengah, Semarang, Jateng, Kamis (16/9).

Sondang menyampaikan, PLN juga harus bisa melihat dan mengoordinasikan kebutuhan keuangannya terhadap infrastruktur infrastruktur yang masih harus dibangun. Apakah itu listrik desa, jaringan-jaringan transmisi, dan lain sebagainya. “Sehingga tidak ada lagi persoalan seperti masalah keuangan PLN yang sulit dan membutuhkan pendanaan, baik itu dari negara ataupun penerbitan surat utang,” tutur Sondang.

Menurut Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI tersebut, populasi penduduk di Jawa Tengah cukup besar sebagai *customer* dari PLN. Dan di provinsi yang memiliki *customer* besar, tentu kebutuhan energi listrik juga semakin banyak, di samping kebutuhan listrik bagi dunia industri, perusahaan, dan juga pabrik-pabrik. “Kami menyampaikan bahwa PLN harus *customer oriented* dan memodernisasi seluruh sistemnya, baik itu sistem elektrifikasi, transmisi, infrastruktur, bahkan sampai pada pelayanan kepada *customer*,” pesan Sondang. ■dep/sf

Komisi VII Dorong Sektor Industri Gunakan *Renewable Energy*



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto (paling kiri) saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kawasan Industri Milenium, Cikupa, Tangerang, Banten. Foto: Eki/Man

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi keberadaan Kawasan Industri Milenium di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Menurutnya, industri seluas 1800 hektare di Banten ini sudah cukup signifikan untuk menyumbang PDRB. Selain itu ia juga mendorong sektor industri untuk menggunakan energi yang *renewable* atau energi yang terbarukan. Dalam hal perlistrikan, misalnya, Sugeng mencontohkan industri bisa menggunakan energi tenaga surya atau tenaga panas bumi.

“Karena di dalam industri, listrik itu menjadi nyawa. Tetapi kecukupan listrik atau keterjangkauan listrik tidak semata-mata hanya dari aspek bisa didapat, tetapi ada yang lebih penting lagi ke depan, yakni yang didapat itu energi apa? Listrik bersih atau listrik kotor? Nah sampai ke sana kita pikirkan,” paparnya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kawasan Industri Milenium, Cikupa, Tangerang, Kamis (16/9).

Terlebih, lanjut Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI tersebut, Indonesia sudah menandatangani *Paris Agreement* dan sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16

Komisi VII Apresiasi Hilirisasi Nikel PT OSS

Komisi VII DPR RI meninjau langsung proses produksi *stainless steel* PT Obsidian Stainless Steel (OSS) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari tinjauan tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR



KARENA DI DALAM INDUSTRI, LISTRIK ITU MENJADI NYAWA. TETAPI KECUKUPAN LISTRIK ATAU KETERJANGKAUAN LISTRIK TIDAK SEMATA-MATA HANYA DARI ASPEK BISA DIDAPAT,

Tahun 2016, yang mana hal itu menjadi komitmen untuk mengurangi 29 persen CO2 pada tahun 2030. “Kurang lebih sama dengan 840 juta ton karbon. Dengan kerja sama internasional bahkan sampai dengan 1,1 miliar ton karbon,” terang Sugeng.

Sugeng menyebut upaya-upaya tersebut dilakukan bukan karena Indonesia tunduk pada pihak-pihak tertentu, melainkan untuk memberikan warisan yang baik, yang sehat, kepada generasi berikutnya. “Ini dalam rangka kita ingin memberikan *legacy* baik kepada anak cucu kita, kita mau membangun negara ini, maju, berkadilang tetapi juga berkelanjutan,” imbuh legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VIII tersebut. ■ eki/sf

RI Eddy Soeparno menilai hilirisasi nikel di PT OSS telah berlangsung dengan baik.

“Komisi VII DPR RI hadir melihat langsung hilirisasi proses pengolahan nikel di PT OSS. Komisi VII melihat proses pengolahan nikel yang telah dilakukan PT OSS sebagai jalan yang baik. Dimana, pengolahan nikel sudah dilakukan dari hulu (tambang nikel) sampai ke hilirnya (smelter) hingga menjadi produk *stainless steel*,” ungkap Eddy, Kamis (16/9).

Didampingi Bupati Konawe, Direktur Utama PT Obsidian Stainless Steel, perwakilan Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM, Eddy yang juga Ketua Panitia

Kembangkan Listrik Berbasis EBT, Perlu Keberpihakan Pemerintah

Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menargetkan bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025.

“Saya ingin membangun paradigma atau sudut pandang baru dalam melakukan pengawasan, yang awalnya simbolik, menjadi *problem solver*. Setiap institusi pasti punya masalah. Hadirnya Komisi VII DPR RI saat ini untuk menjembatani *bottleneck*. Apa yang jadi masalah, sampaikan ke kami, itu semangatnya,” tandas politisi Partai Golkar itu. ■ rnm/es

Pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) ternyata bisa berfungsi sebagai penopang beban puncak kelistrikan. Salah satu pembangkit EBT yang memiliki peran ini yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Saguling di Bandung Barat, Jawa Barat.

“Jika terjadi *black out*, PLTA Saguling dapat dioperasikan sebagai *black start* sekaligus berperan menjadi pengisi tegangan untuk menopang pembangkit listrik PLTU Suralaya,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR ke PLTA Saguling, Bandung

Barat, Kamis (16/9).

Menurut Maman, PLTA yang sudah berdiri sejak tahun 1985 dan tetap eksis dengan kapasitas produksi listrik stabil yaitu 700 Mw bisa menjadi contoh terutama daerah *remote area*. “Ini sangat baik, perlu ada keberpihakan penuh melalui regulasi untuk pengembangan PLTA,” katanya, seraya menyampaikan hal itu juga sejalan dengan



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR ke PLTA Saguling. Foto: Ria/man



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno (tengah) saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau langsung proses produksi *stainless steel* PT Obsidian Stainless Steel (OSS). Foto: Puntho/Man

Kerja (Panja) Illegal Mining berharap, hilirisasi nikel yang telah dilakukan PT OSS bisa menjadi contoh daerah lain yang juga memiliki sumber daya alam.

Hadir dalam kunjungan tersebut antara lain Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi (F-Gerindra). Serta Anggota Komisi VII DPR RI Ismail Thomas, Willy Midel Yoseph, Yulian Gunhar, Mercy Christy Barends, Andi Ridwan Wittiri, dan Nasyirul Falah Amru dari PDI-Perjuangan. Hasnuryadi Sulaiman dan Lamhot Sinaga dari Partai Golkar, Moreno Soeprapto (F-Gerindra), Syaikhul Islam dan Ali Ahmad, Marthen Douw dari PKB, serta Rusda Mahmud (F-Demokrat). ■ pun/es

Komisi VIII Dorong UIN Ar-Raniry dan IAIN Lhokseumawe Segera Laksanakan PTM

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mendorong dan mendukung Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe segera melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah pandemi Covid-19. Menurut Yandri, PTM ini menjadi sangat penting, mengingat pembelajaran jarak jauh (PJJ) belum mampu memberikan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan memberikan pemahaman yang baik bagi para mahasiswa. Jika PJJ terus berlangsung, maka dikhawatirkan hilangnya pendidikan berkualitas yang mengakibatkan menurunnya kemampuan lulusan dari perguruan tinggi.

Yandri mengungkapkan hal tersebut usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Aceh Besar, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Kakandepag Aceh Besar, Rektor UIN Ar-Raniry dan Rektor IAIN Lhokseumawe dalam rangka meninjau peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi keagamaan negeri dan dukungan penanganan Covid-19 oleh Kementerian Sosial RI, Kementerian Agama RI dan BNPB, di Kota Jantho, Aceh Besar, Aceh, Rabu (15/9).

“Kita mengundang Kakanwil Agama Aceh, UIN Ar-raniry dan IAIN Lhokseumawe dalam rangka persiapan tatap muka, karena tatap muka menjadi sangat penting di tengah sudah hampir 2 tahun pandemi Covid-19. Kenapa penting? kita sudah evaluasi kalau tidak ada tatap muka sekolah maka kita kelihatannya akan *loss generation*. Artinya, ada generasi yang lepas dari

karakter yang kita harapkan, kemudian manusia yang berkualitas tidak akan tercapai. Maka kita minta betul UIN dan IAIN atau STAIN atau madrasah, pondok pesantren mempersiapkan diri untuk tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan,” kata Yandri.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dalam pendidikan tinggi di masa pandemi Covid-19, Yandri berharap, UIN dan IAIN turut melakukan adaptasi dengan sistem teknologi daring dan sarana prasarananya. Kondisi ini diharapkan dapat melatih dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa menguasai teknologi informatika dan terbiasa dengan sistem teknologi informasi terkini.

“Meningkatkan literasi digital bagi dosen dan mahasiswa serta tenaga kependidikan di masa pandemi Covid-19 untuk terus ditingkatkan,” kata politisi Partai Amanat Nasional

(PAN) tersebut.

Yandri melanjutkan, perisapan yang telah dilakukan UIN dan IAIN untuk PTM yakni dengan mengikuti vaksinasi bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Selain itu, seluruh sarana dan prasarana yang menyangkut protokol kesehatan Covid-19 sudah disiapkan dengan baik, dan kesadaran akan prokes dijalankan dengan baik.

Legislator dapil Banten II tersebut menyatakan, Komisi VIII DPR RI senantiasa memberikan dukungan bagi pertumbuhan dan perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan khususnya di madrasah dan pondok pesantren serta kepada UIN dan IAIN, melalui dukungan anggaran.

Turut hadir sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI, di antaranya John Kenedy Azis, Muhammad Ali Ridha, Hasan Basri Agus, M. Husni, Jefry Romdonny, Anisah Syakur, Bukhori Yusuf dan Nur Azizah Tahmid. ■ qq/sf



Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Aceh Besar, Aceh. Foto: Ojil/Man

Komisi VIII Apresiasi Saluran CSR PTFI



Foto bersama Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI di Mimika, Papua. Foto: Kresno/Man

Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang mengapresiasi PT Freeport Indonesia (PTFI) yang menyalurkan dana *corporate social responsibility* (CSR) untuk melengkapi

fasilitas RS Mitra Masyarakat, Mimika Sport Complex dan Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

“Investasi sosial yang dilakukan PTFI patut diacungi jempol. Di mana, PTFI

sudah membangun sekolah, fasilitas olahraga dan rumah sakit. Adanya fasilitas ini membantah stigma selama ini bahwa Papua jauh tertinggal,” ucap Samsu Niang saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Mimika, Papua, Rabu (15/9).

Ia mencontohkan, CSR dari PTFI yang disalurkan kepada Sekolah Asrama Taruna Papua sangat bermanfaat dalam mendidik anak-anak asli Mimika dari Suku Amungme dan Kamoro. “Kita acungkan jempol bahwa SATP ini menjadi tempat kader anak-anak Papua menjadi pemimpin bangsa,” ujar Samsu ketika mengunjungi SATP di Kelurahan Wonosari Jaya SP 4.

Ke depan, ia berharap, PTFI tidak hanya mengembangkan di CSR di Mimika saja, tetapi juga harus berdampak untuk Papua secara keseluruhan. “Karena bagaimana pun Freeport sudah mengambil keuntungan besar di Papua. Mestinya harus mengembalikan sebagian keuntungan untuk membangun pendidikan yang berstandar internasional, supaya kita jangan ketinggalan,” ujar Samsu. ■ eno/es

Komisi VIII Dukung Transformasi IAIN Cirebon Menjadi UIN

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendukung transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Menurutnya dibutuhkan pengelolaan yang profesional, transparan dan akuntabel untuk mencetak SDM yang berkualitas dan berdaya saing kompetitif agar dapat menjadi suatu universitas yang terpadang.

“Kita di Komisi VIII mendukung agar IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi UIN. Pemerintah telah merancang *making* Indonesia 4.0 yang menuntut ketersediaan SDM mumpuni

untuk mencapainya. Selain itu, direncanakannya IAIN Cirebon sebagai *Host Cyber Islamic University* pada tahun 2022 juga menuntut pengelolaan yang kreatif dan inovatif,” pungkask Selly saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI ke IAIN Syekh Nurjati, di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (16/9).

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini mengatakan, pengelolaan IAIN Syekh Nurjati mulai dari perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, hingga evaluasi harus dilakukan dalam kerangka penjaminan mutu. Dengan demikian, target untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetitif akan tercapai.

“Dukungan Komisi VIII DPR RI tersebut diharapkan berimplikasi positif terhadap perguruan tinggi keagamaan Islam, termasuk IAIN Syekh Nurjati. IAIN Syekh Nurjati yang lahir sejak 12 Agustus 1965 hingga bertransformasi menjadi seperti sekarang telah melewati berbagai tantangan dengan mulus,” tutup Selly. ■ tn/sf

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. Foto: Taufan/Man



Dukung PON XX 2021, Komisi IX Tinjau Distribusi Vaksin Covid-19 di Papua



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin Tim Kunspek Komisi IX DPR RI meninjau distribusi vaksin Covid-19 di Papua. Foto: Arief/Man

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena memastikan Komisi IX DPR RI memberikan dukungan optimal kepada pemerintah pusat dan pemda di Papua yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga (PON) XX Papua 2021. Ia menegaskan, dari aspek kesehatan yang paling pertama adalah suksesnya vaksinasi Covid-19 serta berbagai dukungan kesehatan yang dibutuhkan panitia dan kontingen.

“Jika melihat perkembangan dari Dinkes Papua secara umum sudah bagus dari persiapan aspek kesehatan. Tentu ada beberapa hal yang harus dibenahi. Kami akan terus mendorong agar pemda bisa didukung oleh Kemenkes dan semua yang bisa membantu khususnya untuk menyukseskan PON di tanah Papua,” kata Melki usai pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Ditjen Kemenkes RI, BPOM Provinsi Papua, Kadis Kesehatan Provinsi Papua, di Jayapura, Papua, Jumat (17/9).

Melki menerangkan, terkait pendistribusian vaksinasi di Papua,

ada beberapa parameter yang harus diperbaiki. Parameter tersebut seperti bagaimana ketersediaan vaksin dari pusat ke tingkat provinsi, Kabupaten/kota. Masih butuh kerja ekstra agar vaksinasi di tanah Papua berjalan sesuai rencana.

Legislator Harap Karyawan Kena PHK Diberdayakan Melalui Program Kewirausahaan

Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari tak memungkiri dampak dari pandemi Covid-19 sangat luas terhadap roda perekonomian di Indonesia.

“Secara geografis, di Papua ini tidak mudah. Jika melihat pemetaan, masih butuh kerja ekstra yang kuat dari seluruh komponen untuk menyukseskan persiapan vaksinasi di tanah Papua. Saya berharap momentum PON ini bisa dijadikan percepatan vaksinasi di tanah Papua,” dorong Melki.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, selain pelaksanaan vaksin, Komisi IX juga ingin memastikan bahwa penanganan pandemi di tanah Papua juga berjalan baik. Sehingga proses pelaksanaan PON dari sebelum sampai pasca pelaksanaan, pandemi di Papua bisa terkendali.

“Seperti kita ketahui selain pandemi Covid 19, di Papua ada endemik malaria. Kita tidak ingin orang pulang dari tanah Papua justru kena malaria. Ini akan kami bahas agar itu tidak sampai terjadi,” tutur Melki. ■ afr/es

Dunia usaha pun terpaksa melakukan berbagai cara untuk bertahan, salah satunya pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawannya. Putih berharap karyawan yang terkena PHK dapat diberdayakan kembali melalui program kewirausahaan. Program tersebut menurutnya bisa menjadi terobosan atau solusi bagi para pekerja untuk bertahan hidup. “Saat ini yang pada akhirnya beberapa perusahaan harus melakukan PHK dengan cara terpaksa. Sehingga dalam situasi pandemi saat ini PHK tidak bisa di hindari,” kata Putih usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbangut dan Kepala BBPLK Medan di Kantor

Komisi IX Dorong Evaluasi Sistem dan Administrasi untuk Optimalisasi Penerima BSU

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti pelaksanaan program bantuan pemerintah berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja atau buruh dalam masa pandemi Covid-19 di Surakarta. Menurutnya perlu adanya evaluasi dari beberapa sisi, salah satunya sisi sistem sehingga memudahkan para penerima BSU mendapatkan akses untuk melacak (tracking) data apakah mereka menjadi salah satu penerima bantuan.

“Jadi BSU itu harus di-tracking sendiri. Nah ini yang kita perlu melihat, mengevaluasi juga sistem kita seperti apa. Jangan sampai mereka (masyarakat) sebenarnya masuk



Foto bersama Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Foto: Pdt/Man

(penerima) BSU, tapi tidak punya akses untuk bisa men-tracking, apakah dia sudah masuk atau tidak, ini sehingga

BSU tidak di-update, itu yang dari sisi sistemnya,” paparnya saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (17/9).

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI yang akrab disapa Ninik ini menambahkan, evaluasi dari sisi administrasi juga perlu dilakukan melihat masih ada beberapa penerima BSU di Surakarta yang belum terverifikasi datanya untuk menerima bantuan.

“Yang kedua adalah kita perlu melihat lagi, tadi kata Pak Wali Kota (Solo) ada 160 sekian (penerima BSU) tapi yang diverifikasi 113. Berarti ada sekitar 50 sekian yang tidak masuk. Kita harus melihat lagi apakah persoalannya di mana. Apakah persoalan administrasi atau persoalan apa. Karena kita harus memastikan bahwa teman-teman yang mendapatkan BSU tidak terkebirikan haknya Nah kita harus lihat juga itu,” komitmen Ninik. ■ pdt/sf

Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat (17/9/2021).

Di sisi lain, Putih menilai perlindungan kepada pekerja/buruh yang ter-PHK atau dirumahkan saat pandemi

Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari. Foto: Runi/Man

Covid-19 di Sumut sudah cukup maksimal dalam memberikan stimulan maupun jaring pengaman sosial untuk para korban PHK. Kendati bantuan yang diberikan pemerintah pusat maupun provinsi belum sebanding dengan jumlah yang ter-PHK di tengah pandemi.

“Ke depannya masukan-masukan yang kita dapat hari ini dalam pertemuan terkait ketenagakerjaan akan kami diskusikan dalam rapat bersama para mitra kerja terkait. Dengan demikian saya menginginkan para pekerja yang terkena PHK sudah seharusnya mendapatkan kompensasi yang seimbang sebagaimana mana sudah tertera dalam aturan ketenagakerjaan,” harap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI tersebut. ■ rni/sf



Destinasi Rammang-Rammang Layak Jadi Desa Wisata dan Kampung Tematik

Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menilai Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan layak untuk memiliki Desa Wisata Kampung Tematik, mengingat potensi yang dimiliki Maros sangat besar dalam hal pariwisata. Destinasi tersebut di antaranya kawasan karst Rammang-Rammang, Leang-Leang yang memiliki lukisan di dalam goa berumur 4000 tahun, Taman Nasional Bantimurung dengan keanekaragaman kupu-kupunya dan air terjun serta taman yang bisa menjadi pilihan bagi wisatawan lokal ketika berkunjung ke Sulsel.

“Kalau bicara tentang potensi Maros adalah salah satu kabupaten dari 24 Kabupaten di Sulsel yang memiliki

potensi yang sangat besar dalam hal destinasi wisata,” kata Amure, sapaan akrab Andi Muawiyah Ramly, usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI meninjau Desa Wisata Rammang-Rammang, Maros, Sulsel, Jumat (17/9).

Terkait dengan Desa Wisata Rammang-Rammang, Amure menjelaskan bahwa desa wisata ini dibuka pada tahun 2019 yang kemudian menjadi viral, karena semua destinasi didatangi oleh berbagai wisatawan luar negeri meskipun jumlahnya masih sedikit. Di samping itu, selama 2 tahun Rammang-Rammang sudah diwacanakan untuk menjadi kawasan wisata Nasional dan juga kandidat

Geopark Maros Pangkep. Mengingat, di Rammang-Rammang terdapat kawasan karst yang merupakan karst nomor dua setelah Meksiko.

“Karst ini adalah nomor dua di dunia sesudah Meksiko tentunya, itu yang kita lewati tadi sepanjang sungai itu kepurbaan yang kita miliki di sini yang bisa menjadi objek mancanegara dan wisata nusantara,” ungkap Anggota F-PKB DPR RI itu. Amure pun mengakui, bahwa Rammang-Rammang ini masih perlu peningkatan sarana dan prasarana juga fasilitas wisata di dalamnya, seperti tempat sampah, toilet, infrastruktur jalan dan lain sebagainya.

Menurut Amure, kekurangan-kekurangan yang masih dimiliki oleh Desa Wisata Rammang-Rammang itulah penyebab dirinya terus menerus menyampaikan kepada mitra kerja Komisi X DPR RI, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), agar Rammang-Rammang dapat dikembangkan selayaknya kawasan wisata yang dapat menjadi tumpuan masukan anggaran bagi pemerintah daerah dari sektor pariwisata.

“Dan tentu saja apa yang kita sampaikan di Komisi X sudah ditindaklanjuti, diantaranya 2 bulan yang lalu saya kesini membawa pak Menteri Parekraf, dan salah satu makna kunjungan itu lalu beliau membangun tower sinyal komunikasi internet, karena dulu sinyal putus sambung, tentu saja kedatangan kita Komisi X ini betul-betul ingin melihat bagaimana perkembangan lebih jauh tentang Rammang-Rammang ini,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Sulsel II itu. ■ ndy/sf



Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI meninjau Desa Wisata Rammang-Rammang, Maros, Sulsel. Foto: Nadia/Man

Optimalkan Wisata Berbasis Masyarakat, Komisi X Tegaskan Pendampingan Merata



Foto bersama Tim Kunspek Komisi X DPR RI di Desa Panglipuran, Kabupaten Bangli, Bali. Foto: Saum/Man

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menegaskan pendampingan pengelolaan potensi desa wisata berbasis masyarakat harus merata dilaksanakan di Indonesia. Jika terjadi ketimpangan pendampingan akibat lebih memilih destinasi prioritas,

para pengelola desa wisata akan susah untuk mandiri, kehilangan arah sekaligus suli memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

“Agar berkembang dengan baik, setiap desa yang berpotensi menjadi desa wisata harus mendapat pendampingan,” terang Ledia saat ditemui **Parlementaria** usai mengikuti

Kunjungan Kerja Spesifik Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI ke Desa Panglipuran, Kabupaten Bangli, Bali, Jumat (17/9).

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu turut menyoroti soal nomenklatur desa di tingkat kabupaten. Menurutnya, akibat nomenklatur tersebut, desa yang berada di dalam kota mengalami masalah pelik untuk mendapatkan pembiayaan serta bantuan untuk meningkatkan kualitas potensi wisata.

“Saya sudah berkali-kali mengingatkan Kemenparekraf. Nomenklatur harus dua, yaitu desa wisata dan kampung tematik. Karena kalau desa tidak dikenal di kota. Sementara ada banyak kota, di antaranya ada desa yang punya potensi wisata yang luar biasa,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat I tersebut. ■ ts/sf

Komisi X Berharap Pemerintah Serious Dukung Desa Wisata

Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mendorong agar pemerintah dapat lebih serius dalam mendukung keberadaan desa wisata. Dalam Kunjungan Kerja Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI ke Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang

kali ini, Zainuddin melihat ada beberapa aspek yang harus diperkuat bagi desa wisata di Indonesia.

“Menurut saya yang perlu di-*support* seperti bimbingan bantuan konsultasi dalam merancang atraksi yang bagus agar bisa jadi daya tarik. Lalu pendorongan agar ada kolaborasi dengan UMKM setempat,” terangnya di sela-sela mengunjungi Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/9). Adapun di Desa Wisata Pujon Kidul, menurut Zainuddin mereka berkembang atas inisiatif sendiri. Tampaknya dukungan dari pihak pemerintah belum terlalu banyak.

Desa ini kata Zainuddin memang disokong oleh komitmen warganya yang bersemangat dalam melakukan inovasi membuat atraksi wisata yang memikat pengunjung ke desa mereka. Untuk itulah, Anggota Fraksi Partai

Amanat Nasional DPR RI itu berharap pemerintah dapat memaksimalkan pendampingan, khususnya dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM). ■ ah/sf



Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki. Foto: Agung/Man

BKSAP Bahas Isu-Isu SDGs dengan Sivitas Akademika Unsub



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera bertukar cenderamata dengan Rektor Universitas Subang usai acara BKSAP SDGs Day bersama sivitas akademika Unsub dan perwakilan Pemkab Subang. Foto: Ria/Man

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, dalam menjalankan tugas sebagai *second track diplomacy* DPR RI, dapat membantu pemulihan dan pengembangan potensi ekonomi daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di seluruh daerah di Indonesia. Sejak SDGs disahkan pada 2015 lalu, Indonesia menjadi salah satu negara yang rutin membuat *voluntary national report* (VNR). SDGs, menurut Mardani memiliki kajian yang komprehensif terkait upaya bersama memajukan suatu bangsa.

Mardani mengungkapkan hal tersebut dalam BKSAP SDGs Day bertajuk "Peran Strategis Diplomasi

Parlemen BKSAP DPR RI Dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)" di Universitas Subang (Unsub), Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (17/9). Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Anggota BKSAP DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin (F-PD), Jazuli

”

BKSAP DPR RI MENEMUKAN DUA POTENSI YANG BISA DIKEMBANGKAN DARI UNSUB DAN SUBANG, YAKNI SEKTOR PERTANIAN DAN KOLABORASI RISET.

Juwaini (F-PKS), dan Nazaruddin Dek Gam (F-PAN). Delegasi BKSAP DPR RI diterima Rektor Unsub beserta jajaran dan perwakilan Pemkab Subang.

"Salah satu isu besar kita adalah SDGs, ada 17 *goals*. SDGs ini sudah disepakati di United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa), dan hampir diikuti oleh semua negara Anggota UN. Salah satu yang kita rajut, dinamika di daerah bisa disambungkan oleh parlemen, sehingga daerah bisa melompat kembali, karena ada banyak cara agar daerah bisa berkembang. Secara umum, SDGs itu *no one left behind* atau keadilan. Tidak boleh ada kemiskinan, jadi pendekatannya tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera," jelas Mardani.

Anggota F-PKS DPR RI itu menambahkan, setidaknya BKSAP DPR RI menemukan dua potensi yang bisa dikembangkan dari Unsub dan Subang, yakni sektor pertanian dan kolaborasi riset. Dengan adanya Fakultas Agribisnis dan Rekayasa Pertanian (Agrorektan) di Unsub dapat mengembangkan sektor pertanian di Subang. Kemudian, Unsub dapat melakukan kolaborasi riset dengan universitas di luar negeri untuk meningkatkan kualitas. BKSAP akan berperan untuk menyambungkan kolaborasi antara universitas di dalam dan luar negeri. Sehingga Unsub dan universitas lain di Indonesia bisa melakukan kerja sama banyak universitas di luar negeri.

"Kita akan melanjutkan komunikasi dan di beberapa kesempatan kunjungan kerja ke luar negeri itu kita punya kesempatan untuk menyambungkan, menjadi jembatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mencari *partner* universitas di luar negeri, bukan cuma buat Unsub, tapi buat beberapa universitas yang telah kita kunjungi. Kita akan buat *talent pool research*, dan universitas mana yang tertarik, kita jalankan kolaborasi. Kami juga membuka peluang magang di BKSAP, membuka peluang kepada setiap pihak suntuk terlibat dalam diplomasi parlemen, untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sehat," tutup Mardani. ■ sf

BURT Tinjau Fasilitas RS Mandaya Royal Hospital Puri



Foto bersama Pimpinan dan Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dengan direksi RS Mandaya Royal Hospital Puri Tangerang, Banten. Foto: Novel/Man

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah memimpin Tim Kunker BURT meninjau RS Mandaya Royal Hospital Puri yang merupakan salah satu RS *Provider* dari PT Asuransi Jasindo yang melayani peserta Jamkestama. Dimiyati menilai rumah sakit tersebut representatif karena fasilitasnya yang cukup modern dengan peralatan medis yang canggih.

“Kami melihat dan mendengar RS ini sangat representatif, sekelas dengan RS yang ada di Singapura. Ternyata begitu kita berkunjung, ya memang luar biasa. Kamarnya bagus, dokter-dokter spesialisasinya mumpuni, profesional. Fasilitasnya dari mulai MRA, CT Scan dan lain sebagainya mungkin satu-satunya di

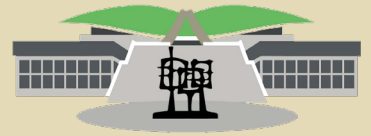
Indonesia yang paling modern,” ujar Dimiyati di RS Mandaya Royal Hospital Puri di Tangerang, Banten, Rabu (15/9).

Selain itu, Dimiyati juga meminta Jasindo untuk segera bekerja sama lebih intens dengan RS Mandaya Royal Hospital Puri. Karena RS ini dinilai profesional serta aksesnya cukup mudah dijangkau dekat dengan tol dan bandara. Ia juga berharap RS Mandaya Royal Hospital Puri dapat melayani kesehatan masyarakat, anggota DPR RI beserta keluarganya secara paripurna.

“Mandaya Royal Hospital Puri ini profesional, tempatnya bagus, fasilitasnya lengkap, SDM-nya bagus, dokter spesialisnya banyak dan menurut posisi rumah sakit ini adanya di ujung Jakarta dekat dengan bandara maka ini sangat pas untuk anggota DPR dan keluarga serta para pejabat negara lainnya,” pungkasnya.

Di sisi lain, dalam paparannya, Presiden Direktur Mandaya Royal Hospital Puri dr. Ben Widjaja, MBChB(UK) menjelaskan RS Mandaya Royal Hospital Puri memiliki tiga pusat keunggulan pelayanan pasien, yaitu mulai dari sisi jantung dan pembuluh darah, kemudian syaraf yaitu otak dan tulang belakang serta kanker.

“Jadi segala peralatan yang lumayan *advance*. Terbaru di tiga bidang ini kami investasikan sangat banyak dan juga dokternya sangat lengkap dan tentunya masing-masing dokter tidak bekerja sendiri tetapi kita membentuk suatu tim dokter. RS ini juga berkolaborasi dengan rumah sakit di Inggris dan di Amerika untuk dapat menangani pasien secara kolaboratif untuk mendapatkan diagnosa dan tindakan yang terbaik untuk pasien,” terang dr. Ben Widjaja. ■ *nvl/ves*



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima laporan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie terkait Calon Anggota BPK RI periode 2021-2026 di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9). Foto: Jaka/Man



Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso bersama Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha menghadiri rapat koordinasi pengawasan Inspektorat Utama Setjen DPR RI, di Jakarta, Jumat (17/9). Foto: Dipa/Man



Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat membuka Seminar Nasional Badan Keahlian DPR RI dengan tema 'Peran Pembentukan Undang-Undang dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi' di Banten, Jumat (17/9). Foto: Eko/man